Jurnal Politik Profetik
Volume 13, Nomor 1, Juni 2025 (56-73)
ISSN 2549-1784 (Online), 2337-4756 (Print)
https://doi.org/10.24252/profetik.v13i1a3
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp

Kebijakan Domestik Bangladesh Terhadap Pengungsi Rohingya: Analisis Idiosinkratik atas Kepemimpinan Sheikh Hasina

Harisa Firdaus Pahlawan[1], Akim[2], Darmansyah Djumala[3]

Abstract

Bangladesh's domestic policy in responding to the Rohingya refugee crisis is influenced by Sheikh Hasina's idiosyncratic nature and her efforts to raise Bangladesh's profile in the eyes of the international community. This study uses Rosenau's idiosyncratic approach with descriptive qualitative analysis methods. Data was collected through literature review, including journals, books, internet portals, and related documents. The findings of this study indicate that idiosyncratic factors such as the personal characteristics and leadership style of Sheikh Hasina play a significant role in determining the direction and response of Bangladesh's domestic policy towards the ongoing until this study was conducted.

Keywords

Bangladesh; Domestic Policy; Idiosyncratic; Sheikh Hasina

Abstrak

Kebijakan domestik Bangladesh dalam merespons penanganan pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh idiosinkratik Sheikh Hasina dan upayanya untuk mengangkat citra Bangladesh agar dilirik oleh dunia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan idiosinkratik dari Rosenau dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Data-data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup jurnal, buku, portal internet, dan dokumen terkait. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor idiosinkratik seperti karakteristik pribadi dan kepemimpinan dari Sheikh Hasina memainkan peran yang signifikan dalam menentukan arah dan respon kebijakan domestik Bangladesh terhadap penanganan pengungsi yang masih berlangsung sampai penelitian ini dilaksanakan.

Kata Kunci

Bangladesh; Kebijakan Domestik; Idiosinkratik; Sheikh Hasina

[1] Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
[2] Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
[3] Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Corresponding Author:
Harisa Firdaus Pahlawan, Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia ✉ harisa23001@mail.unpad.ac.id

Copyright © The Author(s), 2025.

Article history

Received 3 May 2025
Revised 28 May 2025
Accepted 4 June 2025
Published 14 June 2025

Cite this article

Pahlawan, H.F., Akim., & Djumala, D. (2025). Kebijakan Domestik Bangladesh Terhadap Pengungsi Rohingya: Analisis Idiosinkratik atas Kepemimpinan Sheikh Hasina. *Jurnal Politik Profetik*, *13(1)*, 56-73. https://doi.org/10.24252/profetik.v13i1a3

Pendahuluan

Eksodus Rohingya merupakan salah satu fenomena krisis pengungsi di Asia. Migrasi Rohingya ini awalnya dipicu oleh kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine terhadap etnis Rohingya. Sejak 2017, hampir mendekati ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari target operasi militer. Bentuk represif militer Myanmar terhadap Rohingya tercermin adanya penindasan, pembantaian, serta penghancuran desa-desa mereka. Penolakan Myanmar merupakan ketidakamanan bagi Rohingya yang menyebabkan terjadinya gelombang pengungsian yang menargetkan negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan India untuk mencari perlindungan sementara. Adapun sebagian dari mereka berusaha mencapai negara-negara Timur Tengah, dimana terdapat komunitas Rohingya yang sudah lama menetap (Leider, 2018).

Pemilihan Bangladesh oleh Rohingya disebabkan oleh faktor geografis dan sosial. Secara geografis, Bangladesh berbatasan dekat dengan Negara Bagian Rakhine di Myanmar, kedekatan ini mempermudah pencari suaka asal Rohingya untuk menjangkau Bangladesh ketika mereka melarikan diri dari pengejaran militer Myanmar. Juga terdapat jalur yang relatif mudah dilewati, yakni jalur Sungai Naf memungkinkan pengungsi menyeberang dengan perahu atau berjalan kaki dalam waktu singkat (UNHCR, 2016). Faktor sosial pun berperan, karena mayoritas penduduk Bangladesh beragama Islam, sehingga pengungsi Rohingya merasa memiliki kedekatan kultural dan religius yang dapat memberikan rasa aman (Ansar & Md. Khaled, 2021).

Pengungsi Rohingya ditempatkan di salah satu kawasan penampungan, yaitu Cox's Bazar. Lebih dari satu juta orang Rohingya menetap di kamp-kamp pengungsi di kawasan tersebut dan memperoleh izin tinggal sementara sebagai pengungsi hingga krisis kemanusiaan yang mereka hadapi dapat diselesaikan oleh komunitas internasional. Selama berada di Cox's Bazar, pemerintah Bangladesh telah mengatur kebijakan penanganan pengungsi yang telah disesuaikan oleh standar *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengenai pengungsi. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pemerintah Bangladesh dan UNHCR telah menyediakan sarana pendidikan bagi sekitar 400.000 anak di kamp Cox's Bazar pada tahun 2022. Sebanyak 300.000 anak di antaranya mengikuti kegiatan belajar di pusat-pusat pembelajaran yang dikelola oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan lembaga pendidikan lainnya yang bekerja sama dalam mempersiap-

kan generasi muda Rohingya untuk menghadapi kemungkinan repatriasi di masa depan (UNICEF, 2022).

Anak muda Rohingya di kamp pengungsian Cox's Bazar juga mendapat perhatian dari pemerintah Bangladesh dan organisasi internasional lainnya melalui berbagai bentuk pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesiapan kerja mereka ketika telah diberangkatkan menuju negara ketiga atau upaya repatriasi berhasil dilakukan. Upaya ini telah berlangsung sejak 2022, melibatkan *International Labour Organization* (ILO) bersama UNHCR, mengembangkan kerangka pelatihan berbasis kompetensi dengan *output* pengungsi Rohingya masuk sebagai masyarakat ASEAN yang terverifikasi tenaga siap kerja. Hingga Maret 2025, lebih dari 5.500 pengungsi Rohingya telah menyelesaikan pelatihan dalam sepuluh bidang prioritas, seperti penjahit, perpipaan, mekanik mesin kecil, listrik bangunan, produksi tanaman, pekerja kesehatan komunitas, perawatan, dan industri makanan pembuatan roti (ILO, 2025). Pelatihan ini memiliki dampak positif untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan produktif, seperti menjadi relawan di kamp, memulai dan menjalankan bisnis seperti penjahitan dan produksi makanan, secara tidak langsung meningkatkan kemandirian Rohingya dan membantu kebutuhan Bangladesh dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.

Sikap terbuka terhadap pengungsi Rohingya tidak terlepas dari peran kepemimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Di masanya, politik dalam negeri Bangladesh diarahkan dan lebih menekankan pada isu kemanusiaan. Selama kepemimpinannya, Bangladesh telah menerapkan berbagai kebijakan dalam menangani pengungsi Rohingya, mencakup aspek kemanusiaan, pengelolaan kamp, serta diplomasi internasional. Sikap politik Sheikh Hasina melalui isu kemanusiaan dinilai sebagai strategi untuk menarik perhatian dunia internasional, terutama negara-negara berpengaruh di dunia (Choudhury, 2024). Hal ini terbukti, dimana Sheikh Hasina melalui isu krisis pengungsi Rohingya berhasil memperoleh simpati dan dukungan, serta disorotnya Bangladesh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Bank Dunia, dan berbagai negara yang terlibat sebagai donor bantuan kemanusiaan, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah (Ministry of Foreign Affairs Republic of Bangladesh, 2019).

Sheikh Hasina juga membawa Bangladesh berperan aktif dalam forum internasional, seperti mendorong PBB dan Organisation Kerja Sama Islam (OKI) membujuk Myanmar agar dapat bekerja sama menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya (Aung, 2020). Dengan menunjukkan kepemimpinan Sheikh Hasina terhadap penanganan pengungsi, Bangladesh memperkuat posisinya sebagai aktor diplomatik yang berpengaruh di Asia Selatan. Di mana Bangladesh berusaha meningkatkan posisi tawar Bangladesh untuk membuka peluang dalam kerja sama pembangunan dan perdagangan global untuk memenuhi kebutuhan Bangladesh. Namun dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan pengungsi Rohingya ke Bangladesh memunculkan tantangan yang kompleks. Di tengah tekanan internasional untuk melanjutkan penerimaan Rohingya, kebijakan domestik yang diterapkan oleh Sheikh Hasina justru menunjukkan adanya pembatasan terhadap penerimaan lebih lanjut. Alasan

ini berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap memburuknya stabilitas ekonomi dan sosial Bangladesh. Kondisi ini mencerminkan dilema kebijakan yang sedang dihadapi pemerintah, antara tuntutan kemanusiaan dan kepentingan nasional. Pada akhirnya memperkuat persepsi bahwa pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi dan kepemimpinan Sheikh Hasina secara langsung.

Penelitian ini difokuskan pada analisis idiosinkratik terhadap Sheikh Hasina sebagaimana dikemukakan oleh Rosenau, bahwa pengaruh seorang pemimpin elite dalam perumusan kebijakan negara dibentuk oleh latar belakang karakteristik pribadi sang pemimpin. Karakteristik tersebut meliputi pengalaman, kepribadian, ras, afiliasi partai politik, bakat, nilai-nilai, orientasi, pelatihan, loyalitas, hingga ciri khas individu lainnya (Rosenau, 1980). Rosenau menekankan bahwa faktor idiosinkratik memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu negara dapat bertindak secara rasional atau tidak. Pandangan ini menunjukkan bahwa negara, sebagai aktor dalam hubungan internasional, bertindak berdasarkan arahan dari elite politik yang terpilih sebagai perumus kebijakan, yang kemudian menentukan posisi negara dalam aktivitas global bersama aktor-aktor lainnya.

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya, seperti Arifin dan Wahyudi (2021). Dalam ulasannya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan Bangladesh, yang semula bersifat terbuka dan kooperatif dengan organisasi internasional, menjadi lebih tertutup dengan penekanan pada kepentingan nasional. Perubahan ini tercermin dalam berbagai langkah kebijakan seperti pembatasan akses internet dan komunikasi di kamp pengungsian, penghentian sementara penerimaan pengungsi, relokasi pengungsi ke Pulau Bhasan Char, serta pembatasan terhadap operasional lembaga-lembaga mitra yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Faruque (2020) menggambarkan awal kepemimpinan Sheikh Hasina sebagai fase dengan pendekatan yang ramah terhadap pengungsi, bahkan dipuji sebagai "ibu kemanusiaan." Pemerintah Bangladesh mengalokasikan dana sebesar USD 4,37 juta dan menyediakan lahan sebagai tempat penampungan sementara. Namun, dalam perkembangan berikutnya, pemerintah mulai memandang keberadaan pengungsi sebagai ancaman, khususnya terhadap keamanan nasional, ketahanan ekonomi, serta degradasi lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Alchatib (2021) menyoroti bahwa kebijakan Bangladesh dalam menghadapi arus besar pengungsi Rohingya dan tantangan ekonomi domestik tetap berfokus pada penyediaan tempat penampungan dan bantuan kemanusiaan. Pemerintah Bangladesh juga menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) untuk mendorong integrasi komunitas lokal serta reunifikasi budaya antara pengungsi dan penduduk asli. Namun, keterbatasan dana dan kurangnya dukungan internasional menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi secara layak, yang berdampak

pada memburuknya kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Habib (2021) menambahkan bahwa pemerintah Bangladesh, bersama komunitas lokal, bersikap terbuka terhadap krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Mereka menyediakan kamp pengungsian di wilayah perbatasan dan menekankan pendekatan diplomasi kemanusiaan. Upaya diplomasi ini dilakukan melalui dialog bilateral dengan negara-negara seperti China dan India, serta dengan mengajukan resolusi di berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB. Meskipun demikian, Bangladesh di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina tetap menghadapi tantangan besar, terutama akibat krisis ekonomi nasional dan meningkatnya jumlah pengungsi.

Berdasarkan literatur di atas, tampak bahwa kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya tidak dapat dilepaskan dari peran dan karakteristik pribadi Sheikh Hasina sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama; Bagaimana faktor idiosinkratik Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memengaruhi pengambilan kebijakan domestik terhadap pengungsi Rohingya?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dekriptif dengan tujuan mengembangkan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu untuk menghasilkan kebaharuan. Teknik pengambilan data mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yakni meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terhadap sumber-sumber yang dianggap relevan, seperti artikel jurnal, buku, dokumen, portal internet yang dapat mendukung analisis. Data yang dikumpulkan diseleksi dan disampaikan secara naratif lalu disimpulkan.

Pembahasan

Hubungan Diplomatik Bangladesh dan Myanmar

Bangladesh dan Myanmar telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1972, tidak lama setelah Bangladesh memproklamirkan kemerdekaannya dari Pakistan pada Desember 1971. Bangladesh menjadi salah satu negara penting bagi Myanmar, karena secara historis Bangladesh mengakui Burma, nama sebelum berganti menjadi Myanmar, sebagai negara merdeka secara *de jure* dan *de facto* (Faye, 2021). Sejauh ini, hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Myanmar menunjukkan bentuk kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan. Kedua negara telah bernegosiasi mengenai pentingnya pembangunan dan peningkatan kualitas wilayah perbatasan, antara lain dengan membangun *border haat* atau pasar perbatasan guna meningkatkan perdagangan dan konektivitas antar masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, kedua negara juga telah merumuskan kerja sama melalui pembentukan Komisi Bersama untuk kerja sama bilateral, serta menandatan-

gani Nota Kesepahaman untuk mendirikan Dewan Bisnis Bersama (*Joint Business Council/JBC*) antara *Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industries* (UMFCCI) dan *Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries* (FBCCI) (Ahmed, 2020).

Dalam konteks hubungan internal kedua negara, Bangladesh dan Myanmar kerap terlibat komunikasi terkait masalah Rohingya yang berdampak pada wilayah perbatasan mereka. Banyak laporan menyebutkan bahwa sejumlah warga Rohingya melintasi perbatasan Bangladesh secara ilegal, yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi di wilayah Cox's Bazar. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh arus kedatangan Rohingya dari wilayah perbatasan yang berdekatan dengan negara bagian Rakhine di Myanmar. Masalah Rohingya sendiri telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan intervensi dari berbagai aktor internasional. Bangladesh, sebagai salah satu negara yang menampung pengungsi Rohingya, bekerja sama dengan UNHCR untuk mencari solusi jangka panjang. Salah satu solusi yang diupayakan adalah repatriasi, yaitu pemulangan sukarela para pengungsi ke Myanmar, yang direncanakan melalui kerja sama antara Bangladesh, UNHCR, dan pemerintah Myanmar. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk menginisiasi proses repatriasi ini, termasuk pendekatan bilateral yang disepakati oleh Bangladesh dan Myanmar pada tahun 2017 (Obaidullah & Begum, 2025).

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam upaya repatriasi. Dari perspektif Myanmar, masyarakat lokal masih sulit menerima kehadiran Rohingya karena alasan keamanan serta tidak adanya pengakuan kewarganegaraan oleh pemerintah. Sementara itu, dari sudut pandang para pengungsi Rohingya, mereka belum menyetujui repatriasi karena belum terpenuhinya pengakuan atas hak-hak dasar serta jaminan perlindungan. Adapun bagi Bangladesh, pelaksanaan repatriasi yang berkelanjutan membutuhkan terlebih dahulu terciptanya kondisi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi sebelum proses pemulangan dilakukan (Luhukay, 2025).

Historis Konflik Kemanusiaan Rohingya

Seperti diketahui oleh masyarakat internasional, penolakan terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Bangladesh di masa lalu. Rohingya, yang merupakan mayoritas Muslim, telah hidup lama di wilayah Myanmar, khususnya di Arakan. Namun, setelah kedatangan mereka dari wilayah yang kini menjadi Bangladesh pada masa kolonial Inggris, persepsi terhadap Rohingya mulai berubah. Masyarakat Myanmar mulai menyamakan Rohingya dengan pendatang dari Bangladesh. Sebutan Rohingya, yang awalnya merujuk pada komunitas Muslim lokal di Arakan, perlahan digantikan dengan label Bangsa Bengal atau warga ilegal dari Bangladesh. Persepsi ini semakin menguat karena bahasa yang digunakan oleh Rohingya memiliki kemiripan dengan bahasa Bengali yang digunakan di Bangladesh (Smith, 2019).

Bentuk diskriminasi terhadap Rohingya berlanjut pasca Myanmar merdeka dari Inggris. Pemerintah Myanmar melakukan penghapusan etnis Rohingya sebagai ba-

gian dari warga negaranya melalui pengesahan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 (Gehlot, 2021). Penolakan pemerintah dan masyarakat Myanmar mulai memanas ketika melancarkan kampanye "pembersihan etnis" terhadap Rohingya di tahun 2012, kampanye pembersihan etnis ini diperparah karena melibatkan umat Buddha Myanmar. Tindakan seperti pembakaran, penyitaan toko dan perusahaan Rohingya yang berada di Kota Sittwe, mengakibatkan ratusan penduduk Rohingya meninggalkan kota-kota di Negara Bagian Rakhine (House of Commons, 2017).

Selanjutnya di tahun 2016, bentuk penolakan terhadap Rohingya semakin masif. Myanmar menurunkan serangkaian operasi militer sebagai bentuk respons terhadap aksi pemberotakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya, yang tidak setuju terhadap bentuk diskriminasi yang dilakukan. Disebutkan militer Myanmar mengirimkan penembak menggunakan helikopter, disertai dengan operasi militer dengan menargetkan perkampungan dan tempat tinggal Rohingya. Tercatat bentuk dari operasi militer ini dilakukan dengan melakukan penyisiran desa yang brutal, membunuh, memperkosa, dan menyiksa penduduk sambil membakar 430 bangunan (Amnesty International, 2016).

Puncaknya pada 25 Agustus 2017, ketika Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (*Arakan Rohingya Salvation Army*/ARSA) melakukan serangan dengan menargetkan pihak keamanan perbatasan dan militer Myanmar. Terkonfirmasi bahwa serangan ini menewaskan lebih dari selusin polisi Myanmar yang berada di 30 pos keamanan di sepanjang perbatasan Bangladesh. Sebagai respons, Myanmar menetapkan ARSA sebagai kelompok teroris dan mengirimkan operasi militer balasan dengan sekitar 70 batalion (sekitar 30.000–35.000 tentara) ke Negara Bagian Rakhine. Akibatnya, operasi militer tersebut menyebabkan sekitar 620.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan mencari perlindungan di kamp pengungsi Cox's Bazar. Laporan lain menyebutkan bahwa selama operasi berlangsung tahun 2017, setidaknya 6.700 Rohingya tewas, termasuk sekitar 730 anak di bawah usia 4 tahun (Mohajan, 2019).

Kebijakan Domestik Bangladesh Menangani Pengungsi Rohingya

Keberadaan pengungsi Rohingya di Bangladesh, mendorong pemerintahan Syeikh Hasina mengambil kebijakan terkait pengungsian tersebut. Pemerintah Bangladesh menempatkan pengungsi Rohingya secara terpusat di Cox's Bazar untuk memudahkan pengawasan dan penanganan, termasuk memudahkan beberapa lembaga internasional seperti UNHCR dan ILO dalam kerja-kerja kemanusiaan atas pengungsi Rohingya. Adapun bentuk kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya selama mereka tinggal di Cox's Bazar, dapat dilihat pada Table 1 di bawah.

Tabel 1. Kebijakan Bangladesh

Kebijakan	Tindakan	Mitra
Kebijakan Pintu Terbuka	- Penempatan di Cox's Bazar - Penyediaan tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar	UNHCR, UNICEF, WHO, WFP, NGO lokal

	- Fasilitas pendidikan dan kesehatan didirikan - Distribusi makanan dan nutrisi	
Upaya Repatriasi	- Negosiasi dengan Myanmar dan UNHCR - Prinsip 4R: Repatriasi, Reintegrasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi - Rencana pemulangan sukarela dengan jaminan keamanan dan pemulihan martabat	UNHCR, Pemerintah Myanmar, lembaga kemanusiaan lainnya
Sekuritisasi	- Pembatasan mobilitas di kamp (Ukhiya, Teknaf) - Pengetatan pengawasan aktivitas pengungsi - Desakan percepatan repatriasi ke Myanmar - Relokasi ke Pulau Bhashan Char	UNHCR dan Pemerintah Bangladesh

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Kebijakan Pintu Terbuka

Bangladesh merupakan salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya, yang merupakan korban dari operasi militer berkepanjangan di Myanmar. Melalui kebijakan pintu terbuka, Bangladesh menampung sekitar 1 juta pengungsi Rohingya pada tahun 2017. Sebelumnya, beberapa gelombang pengungsi telah masuk ke wilayah Bangladesh, termasuk sekitar 200.000 orang yang sudah bermukim sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 35.000 orang merupakan pengungsi terdaftar akibat eksodus tahun 1992, sementara 74.000 orang lainnya tiba setelah terjadinya kekerasan di Negara Bagian Rakhine pada Oktober 2016 (Hossain, 2020).

Kebijakan pintu terbuka memungkinkan para pengungsi yang telah terdata untuk tinggal di wilayah-wilayah pengungsian yang ditetapkan pemerintah, seperti di Cox's Bazar. Di kawasan ini, Bangladesh bekerja sama dengan berbagai lembaga kemanusiaan internasional untuk menyediakan kebutuhan dasar dan layanan kemanusiaan. Para pengungsi mendapat dukungan untuk tetap melanjutkan hidup, sambil menunggu solusi jangka panjang atas krisis yang mereka hadapi.

Pembangunan fasilitas di Cox's Bazar menunjukkan komitmen Bangladesh dan mitra internasional dalam memenuhi hak-hak dasar pengungsi. Fasilitas pendidikan telah disesuaikan dengan standar penanganan pengungsi, sementara di bidang kesehatan, berbagai sarana medis telah dibangun bersama UNICEF dan WHO. Termasuk di antaranya rumah sakit lapangan yang memberikan layanan kesehatan dasar, imunisasi, vaksinasi, serta perawatan penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan tuberkulosis, yang umum terjadi akibat kepadatan populasi pengungsi (WHO, 2024).

Dalam hal ketahanan pangan, Bangladesh juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyalurkan bahan makanan pokok seperti beras, kacang-kacangan, minyak sayur, dan suplemen nutrisi, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi (Nisbet et al., 2022). Meski begitu, dengan jumlah pengungsi yang terus meningkat dan kini melampaui 1 juta orang, tantangan dalam distribusi bantuan tetap ada (Islam, 2025). Selain itu, Bangladesh bersama UNHCR dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya terus berupaya meningkatkan fasilitas kamp sesuai dengan standar pengelolaan pengungsi. Peningkatan ini meliputi penyediaan tempat tinggal yang layak, sarana kesehatan, dan sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup para pengungsi. Upaya ini dilakukan sesuai dengan panduan dalam *Joint Response Plan* (JRP) yang disusun oleh UNHCR dan mitra-mitranya (Jeong, 2021).

Upaya Repatriasi

Repatriasi menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang diajukan oleh Bangladesh bersama UNHCR dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya di tengah proses negosiasi dengan Myanmar. Pelaksanaan mekanisme repatriasi yang sedang dijalankan oleh Bangladesh bersama UNHCR tetap mengacu pada penyesuaian kondisi para pengungsi yang telah lama tinggal di Cox's Bazar serta jaminan keselamatan dan pemulihan hak-hak dasar bagi etnis Rohingya. Sayangnya, hingga penelitian ini dilakukan, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar belum mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada status kewarganegaraan Rohingya yang masih belum diakui.

Proses repatriasi mengikuti prinsip 4R yang dirumuskan oleh UNHCR, yaitu Repatriasi, Reintegrasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (UNHCR, 2004). Upaya pemulangan atau repatriasi yang difasilitasi oleh Bangladesh bersama UNHCR bertujuan agar para pengungsi dapat menerima kebijakan tersebut dan secara sukarela kembali ke Myanmar dengan aman. Proses reintegrasi menempatkan pengungsi Rohingya sebagai subjek utama pemulangan ke Myanmar, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan derajat serta pengakuan terhadap pandangan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup, penghidupan, dan martabat mereka. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah yang telah disepakati oleh Bangladesh, UNHCR, dan Myanmar sebagai tempat penempatan etnis Rohingya, mencakup pembangunan kembali sekolah, klinik, fasilitas air bersih, sarana umum, dan rumah tinggal. Sementara itu, rekonstruksi bertujuan untuk menciptakan kembali tatanan kehidupan etnis Rohingya di Myanmar, yang mencakup pemahaman terhadap struktur politik, lembaga, dan sumber daya manusia guna membentuk fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Sekuritisasi

Setelah kebijakan pintu terbuka Bangladesh diberlakukan, lonjakan pengungsi Rohingya semakin tinggi dan memburuk. Bentuk sekuritisasi terhadap pengungsi Roh-

ingya oleh pemerintah Bangladesh dilakukan melalui pembatasan mobilitas pengungsi agar tidak dapat keluar bebas dari distrik Ukhiya dan Teknaf, yang merupakan lokasi kamp pengungsian di Cox's Bazar. Pembatasan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat lokal terhadap potensi penyebaran penyakit menular dan kemungkinan terjadinya konflik sosial antara pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh, mengingat sulitnya proses integrasi sosial di wilayah tersebut (Ansar & Md. Khaled, 2021). Selain itu, pengawasan ketat terhadap aktivitas para pengungsi juga diberlakukan, karena terdapat kekhawatiran bahwa jaringan kejahatan transnasional dan kelompok teroris dapat memanfaatkan kerentanan mereka, khususnya dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar dan pangan, untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan senjata, narkoba, perdagangan manusia, hingga penyebaran paham radikal (Pertiwi, 2021).

Gambar 1. Situasi Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar

Sumber: Voice of America Indonesia, 2019.

Implementasi sekuritisasi ini juga disertai dengan tekanan diplomatik kepada pemerintah Myanmar agar segera merealisasikan proses repatriasi yang telah disepakati bersama oleh Bangladesh dan Myanmar dengan dukungan UNHCR. Secara ekonomi dan sosial, Bangladesh menghadapi kesulitan besar jika Myanmar terus menunda atau menolak menerima kembali para pengungsi. Oleh karena itu, langkah sekuritisasi dianggap sebagai opsi kebijakan yang juga mungkin akan ditempuh oleh negara-negara lain dalam situasi serupa. Meskipun demikian, masuknya pengungsi Rohingya melalui jalur tidak resmi tetap sulit dicegah.

Sembari menunggu proses repatriasi, pemerintah Bangladesh merencanakan relokasi sebagian pengungsi ke pulau Bhashan Char. Namun, rencana ini menuai kritik dari berbagai lembaga kemanusiaan karena kondisi geografis Bhashan Char yang rentan terhadap banjir dan bencana alam. Selain itu, infrastruktur dasar dan akses pengiriman bantuan ke pulau tersebut dinilai masih belum memadai untuk mendukung kehidupan para pengungsi secara layak (Hossain, 2020).

Dampak Pengungsi Rohingya Bagi Bangladesh

Perkembangan hubungan internasional Bangladesh sejalan dengan visi politik pemerintahan Syeikh Hasina, yang tidak hanya bertujuan memperluas pengaruh Bangladesh di kancah global, tetapi juga fokus pada pembangunan nasional. Peran Bangladesh dalam isu pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya, menjadi bagian dari strategi diplomasi luar negerinya. Sebagai salah satu tokoh yang mewarisi perjuangan kemerdekaan, Syeikh Hasina berupaya memperkuat posisi Bangladesh melalui peran kemanusiaan di tingkat internasional. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, solidaritas terhadap sesama Muslim, seperti Rohingya, menjadi salah satu pendorong keterlibatan Bangladesh dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Ansar & Md. Khaled, 2021). Sikap ini juga mencerminkan dimensi sosial-politik dari modernisme Islam, di mana isu-isu kontemporer, seperti krisis kemanusiaan, dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam (Karim, 2021).

Namun demikian, upaya Bangladesh dalam menyediakan kehidupan sementara yang layak bagi pengungsi Rohingya di Cox's Bazar sambil menunggu proses repatriasi, menghadapi berbagai tantangan internal. Keberadaan para pengungsi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat lokal. Sebagian masyarakat menilai bahwa kehadiran Rohingya memperparah kesenjangan sosial, terutama karena pengungsi dianggap mengakses sumber daya secara berlebihan. Perbedaan budaya dan kebiasaan antara pengungsi dan warga lokal juga menjadi hambatan dalam membangun integrasi sosial yang harmonis (Chowdhury, 2024). Selain itu, meningkatnya angka kriminalitas yang melibatkan sebagian pengungsi Rohingya turut menimbulkan kekhawatiran. Beberapa di antara mereka disinyalir terlibat dalam aktivitas ilegal yang mengancam stabilitas keamanan setempat, seperti perdagangan manusia dan narkoba. Kondisi ini membuat masyarakat lokal merasa tidak aman, sementara para pengungsi juga menjadi rentan terhadap eksploitasi (Arifin & Wahyudi, 2021).

Analisis Idiosinkratik Kebijakan Domestik Bangladesh Era Sheikh Hasina

Melalui analisis idiosinkratik Rosenau terhadap kepemimpinan Sheikh Hasina dalam pengambilan keputusan, terlihat bahwa latar belakang individu merepresentasikan cerminan dari kebijakan yang diambil sebagai Perdana Menteri Bangladesh, khususnya dalam merespons isu domestik seperti keberadaan pengungsi Rohingya. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, Rosenau menguraikan karakteristik personal, pengalaman kerja, serta lingkungan sosial yang membentuk Sheikh Hasina. Faktor-faktor inilah yang berkontribusi pada arah kebijakan yang diambilnya, sehingga mendorong Bangladesh berada pada posisi seperti saat ini. Nilai-nilai yang melekat pada diri Sheikh Hasina meliputi hal-hal sebagai berikut:

Personal Sheikh Hasina sebagai Politisi

Perjalanan politik Sheikh Hasina menuju posisi elite dalam pemerintahan Bangladesh sangat dipengaruhi oleh pengalaman traumatis yang dialaminya di masa lalu.

Kepribadiannya sebagai seorang perempuan yang kuat, pragmatis, dan bertekad menyatukan nilai-nilai politik dalam tubuh Awami League, sekaligus memperjuangkan peran perempuan dalam pemerintahan, dibentuk oleh tragedi besar yang menimpanya di masa lalu. Pada tahun 1975, kedua orang tuanya, 3 saudara laki-lakinya, dan 18 kerabat dekatnya dibunuh dalam sebuah kudeta militer, sementara Sheikh Hasina berhasil selamat dan sempat menjadi tahanan (Khondker, 2017). Pembunuhan terhadap Sheikh Mujibur Rahman, ayah Sheikh Hasina sekaligus Presiden pertama Bangladesh, disebabkan oleh konflik kepentingan antara militer dan sipil, ditambah dengan situasi ekonomi dan sosial yang tidak stabil (Jazib, 2024).

Sebagai penerus nilai-nilai politik ayahnya, Sheikh Hasina membawa semangat reformasi dan demokrasi ke dalam kepemimpinannya. Ia berupaya menjadikan Bangladesh sebagai negara yang demokratis, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam praktik politik domestiknya, Sheikh Hasina menekankan pembangunan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, serta menunjukkan komitmen terhadap pengembangan teknologi dan perlindungan lingkungan (Khondker, 2017).

Gaya kepemimpinan Sheikh Hasina yang karismatik dan berpikiran terbuka terhadap isu-isu global memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tangguh. Dengan pendekatan politik yang pragmatis dan kepribadian yang kuat, Sheikh Hasina membangun Bangladesh sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam percaturan internasional. Salah satu wujud komitmennya terhadap isu global adalah sikap terbukanya terhadap krisis pengungsi Rohingya. Kebijakan menerima pengungsi Rohingya merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat citra Bangladesh sebagai negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (Rayhan, 2023). Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya dalam menjunjung tinggi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Melalui pendekatan politik pragmatis dan komitmen terhadap isu kemanusiaan, khususnya pengungsi Rohingya, Sheikh Hasina juga berupaya menjaga hubungan baik dengan India, melakukan pendekatan diplomatik terhadap Myanmar, serta membangun komunikasi strategis dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan China (Rayhan, 2023). Kedekatan Bangladesh dengan kekuatan global ini, terutama dalam konteks bantuan kemanusiaan yang melibatkan organisasi internasional seperti UNHCR, membuka peluang kerja sama dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan masyarakat Bangladesh ke arah yang lebih baik.

Pekerjaan dan Partai Politik

Sheikh Hasina dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan dan berkomitmen membangun citra serta peran perempuan dalam politik dan kehidupan sosial di Bangladesh. Komitmen tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai pribadi dan pandangan politik yang ia anut, sekaligus menjadi fondasi bagi partai politik yang dipimpinnya, yaitu Awami League. Di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina, Awami League mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial,

pembangunan ekonomi, demokratisasi di Bangladesh, serta pelestarian identitas dan budaya Bengali (Rayhan, 2023).

Dalam menangani isu Rohingya, Sheikh Hasina melalui pendekatan politik domestiknya membentuk kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup para pengungsi dan penyelesaian konflik jangka panjang. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah penerimaan pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Cox's Bazar. Penanganan pengungsi ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap nasib para Rohingya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun citra Awami League sebagai partai yang memiliki kepedulian sosial tinggi, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Sebagai Perdana Menteri, Sheikh Hasina turut mendorong pembangunan infrastruktur dan penyediaan kebutuhan dasar di kawasan Cox's Bazar, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak pengungsi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan konsistensi dukungan dan orientasi politik Sheikh Hasina, serta pengaruh Awami League dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun Bangladesh tengah menghadapi tantangan internal, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, kebijakan pengungsi yang dijalankan Bangladesh mencerminkan implementasi nilai-nilai politik yang dipegang teguh oleh Sheikh Hasina dan Awami League. Nilai-nilai tersebut mencakup komitmen terhadap kebebasan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, yang menjadi fokus utama dalam masa pemerintahannya.

Nilai-nilai Sheikh Hasina

Sheikh Hasina sebagai Perdana Menteri Bangladesh membawa nilai-nilai yang diwarisi dari pengalaman hidup dan ajaran ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, sekaligus *role model* dalam memimpin Bangladesh. Implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebijakan domestik Bangladesh, khususnya dalam penanganan isu pengungsi Rohingya. Kebijakan tersebut menunjukkan orientasi nasionalisme yang tidak hanya ditujukan kepada rakyat Bangladesh, tetapi juga kepada komunitas internasional. Di tengah krisis ekonomi dan sosial yang melanda, Sheikh Hasina tetap menunjukkan ambisi untuk memperkuat citra Bangladesh sebagai negara yang bertanggung jawab di mata dunia.

Pendekatan yang diambil oleh Sheikh Hasina menjadikan isu Rohingya sebagai sarana diplomasi internasional. Ia memandang bahwa keterlibatan aktif dalam isu kemanusiaan dapat menjadi jembatan untuk membangun kerja sama internasional yang lebih luas, seiring dengan upaya internal membangun negara. Nilai-nilai demokrasi dan komitmen terhadap penyelesaian damai terus dipegang oleh Sheikh Hasina, meskipun dihadapkan pada tantangan tata kelola pemerintahan dan tekanan politik domestik. Melalui pendekatan diplomatis, Bangladesh di bawah kepemimpinannya menjalin hubungan dengan negara-negara lain, serta berbagai organisasi internasional, yang semakin mengangkat posisi diplomatik Bangladesh di mata dunia (Rayhan, 2023).

Dalam masa pemerintahannya, Sheikh Hasina menekankan pentingnya dukungan terhadap kesejahteraan sosial, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi. Pemerintah Bangladesh bekerja sama dengan UNHCR dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya dalam menangani krisis Rohingya, meskipun negara sendiri sedang menghadapi berbagai permasalahan internal. Komitmen tersebut mencerminkan keberanian politik Sheikh Hasina dalam mengambil risiko demi kemanusiaan. Selain itu, prinsip sekularisme yang dijunjung oleh Sheikh Hasina memungkinkan Bangladesh untuk memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, tanpa diskriminasi agama, melainkan murni berdasarkan asas kemanusiaan (Rayhan, 2023).

Keterlibatan aktif Bangladesh dalam isu Rohingya merupakan cerminan dari nilai-nilai politik yang diyakini oleh Sheikh Hasina. Nilai-nilai tersebut telah memberikan ruang hidup sementara bagi para pengungsi Rohingya sembari menunggu solusi jangka panjang dari komunitas internasional, termasuk kemungkinan repatriasi. Hingga saat ini, pengaruh Sheikh Hasina masih sangat kuat dalam arah kebijakan domestik Bangladesh, khususnya dalam penanganan pengungsi Rohingya yang terus menjadi perhatian global.

Kesimpulan

Kebijakan domestik yang dirancang oleh Sheikh Hasina setidaknya dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, pekerjaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh seorang individu. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosenau, seorang elite politik memiliki pandangan yang khas terhadap berbagai isu, dan kebijakan yang diambilnya sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Sheikh Hasina sebagai Perdana Menteri Bangladesh berperan aktif merancang masa depan bagi pengungsi Rohingya, antara lain melalui kebijakan penerimaan sementara di Cox's Bazar serta upaya diplomatik terhadap aktor-aktor kunci guna membangun konsensus atas solusi jangka panjang yang melibatkan Bangladesh secara langsung. Kebijakan kemanusiaan yang diambil Sheikh Hasina juga dapat dipahami dalam kerangka pendekatan idiosinkratik, yang menyoroti pengaruh latar belakang pribadi pemimpin terhadap keputusan politiknya. Namun, analisis kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi kemanusiaan semata, tetapi ini juga dapat dilihat sebagai strategi politik aktor untuk kepentingan nasional negaranya yang lebih luas. Oleh karena itu, kajian mengenai pengungsi dan kebijakan domestik akan terus mengalami perkembangan dalam studi hubungan internasional.

Kontribusi Penulis

Harisa Firdaus Pahlawan: *Writing-original Draft, article full draft*.
Akim: *Writing – review & editing*.
Darmasyah Djumala: *Writing – review & editing.*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa tulisan ini murni karya asli yang bebas dari plagiarisme. Artikel ini belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal lain.

Biografi

Harisa Firdaus Pahlawan adalah mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik, dengan konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung. Beberapa artikelnya telah diterbitkan; Pengungsi, UKIP, dan Euroskeptisme: Memahami Eksistensi Keamanan di Inggris Tahun 2016; Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Kebijakan Lingkungan ASEAN.

Akim adalah dosen tetap Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung. Beberapa artikel yang telah diterbitkan; Resolusi Konflik Batas Wilayah (Backstop) Irlandia Utara dengan Republik Irlandia dalam British Exit; Conflict in Northern Mali: Human Security Issues and Its Alternative of Resolution; Questioning the Regional Integration of Higher Education in ASEAN: Equality for All?

Darmansyah Djumala adalah dosen tetap Hubungan Internasional, diplomat, dan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ia telah memberikan kontribusi di beberapa bidang kerja sama dan ASEAN. Beberapa karyanya meliputi; Diplomasi untuk Rohingya; Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia; Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Konflik Laut China Selatan 2021-2023.

Referensi

Ahmed, N. (2020). *Border haats on Bangladesh-Myanmar border: Opportunities and challenges*. Thefinancialexpress.

Alchatib, S. R. (2021). The Political and Economic Impacts of Rohingya Refugee Crisis: Challenges and Opportunities of Humanitarian Intervention in Post-Conflict Space. *Insignia Journal of International Relations Edisi Khusus*, 88–101. https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.0.0.3904

Amnesty International. (2016). *Myanmar: Security forces target Rohingya during vicious Rakhine scorched-earth campaign*. https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2016/12/myanmar-security-forces-target-rohingya-vicious-scorched-earth-campaign/

Ansar, A., & Md. Khaled, A. F. (2021). From solidarity to resistance: host communities' evolving response to the Rohingya refugees in Bangladesh. *Journal of International Humanitarian Action*, *6*(16). https://doi.org/10.1186/s41018-021-00104-9

Arifin, M., & Wahyudi, F. E. (2021). Analisis Kepentingan Nasional Bangladesh dalam

Kebijakan Penghentian Penerimaan Pengungsi Rohingya. *Journal of International Relations*, *7*(1), 34–48. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v7i1.29867

Aung, A. (2020). The international politics of the Rohingya crisis in Myanmar: China, Japan, and the United States. *Kyoto Working Papers on Area Studies, 134, 1-50.*

Choudhury, S. U. S. (2024). *Sheikh Hasina's Leadership Turns Bangladesh into a Geopolitical Powerhouse*. IDN-InDepthNews. https://indepthnews.net/sheikh-hasinas-leadership-turns-bangladesh-into-a-geopolitical-powerhouse/

Chowdhury, S. A. (2024). Young Rohingya Refugees: Risks and Future Prospects in Bangladesh. In A. K. M. A. Ullah (Ed.), *Handbook of Migration, International Relations and Security in Asia* (pp. 1–16). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8001-7_16-1

Faye, M. (2021). A forced migration from Myanmar to Bangladesh and beyond: humanitarian response to Rohingya refugee crisis. *Journal of International Humanitarian Action*, *6*(1). https://doi.org/10.1186/s41018-021-00098-4

Gehlot, N. (2021). Law and Statelessness: A Case Study of the Rohingya Muslims of Myanmar. *Independent Journal of Burmese Scholarship*, *1*. https://ijbs.online/journal-issues/2021-vol-1/law-and-statelessness-a-case-study-of-the-rohingya-muslims-of-myanmar/

Habib, M. R. (2021). The "stateless" Rohingya in Bangladesh: Crisis management and policy responses. *Asian Politics and Policy*, *13*(4), 577–596. https://doi.org/10.1111/aspp.12611

Hossain, I. (2020). After Humanitarianism: Bangladesh's Evolving Rohingya Policy. In *German Institute of Global and Area Studies* (Issue 2020).

House of Commons. (2017, September 5). *Parliamentary debates (Hansard), 628* (22). https://hansard.parliament.uk/pdf/commons/2017-09-05

ILO. (2025). *ILO supports first-ever competency-based skills development for Rohingya refugees in Cox's Bazar, Bangladesh*. https://www.ilo.org/resource/news/ilo-supports-first-ever-competency-based-skills-development-rohingya

Islam, A. (2025). *Bantuan Dikurangi Pengungsi Rohingya di Bangladesh Was-Was*. Deutsche Welle. https://www.dw.com/id/bantuan-dikurangi-pengungsi-rohingya-di-bangladesh-was-was/a-71908490

Jazib, M. (2024). *Military Coups in Bangladesh till 2024*. Jagran Prakashan. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/military-coups-in-bangladesh-1722855785-1

Jeong, Y. (2021). Diverging Response to the Rohingya Refugee Crisis since 2017 Military Crackdown: Comparative Analysis of Bangladesh and Malaysia. *Korean Journal of International Studies*, *19*(1), 133–165. https://doi.org/https://doi.org/10.14731/kjis.2021.04.19.1.133

Karim, S. (2021). Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Politik Profetik*, *9*(1), 119. https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a7

Khondker, H. H. (2017). Sheikh Hasina of Bangladesh: Politics, Personality and Policies. In V. Montecinos (Ed.), *Women Presidents and Prime Ministers in Post-*

Transition Democracies (pp. 221–237). Palgrave Macmillan London. https://doi.org/https://doi.org/10.1057/978-1-137-48240-2

Leider, J. P. (2018). History and victimhood: Engaging with rohingya issues. *Insight Turkey*, *20*(1), 99–118. https://doi.org/10.25253/99.2018201.07

Luhukay, R. S. (2025). *The Struggle to Accept Rohingya Refugees in The Perspective of Law and Human Rights*. 12–25. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v17i1.12689

Miles, Matthew, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. In *Sage Publication* (Second). Sage Publications.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Bangladesh. (2019). *Selected Speeches of Prime Minister Sheikh Hasina* (Vol. 11). https://mofa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mofa.portal.gov.bd/publications/32c5e7ea_bdcd_4b42_ac9c_e93789035ab4/Select Speeches of.pdf

Mohajan, H. K. (2019). History of Rakhine State and the Origin of Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, *2*(2). https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.34182

Nisbet, C., Lestrat, K. E., & Vatanparast, H. (2022). Food Security Interventions among Refugees around the Globe: A Scoping Review. *Nutrients*, *14*(3), 1–44. https://doi.org/10.3390/nu14030522

Obaidullah, M., & Begum, R. (2025). The Rohingya Crisis and Its Effect on Bangladesh-Myanmar Bilateral Relations: A Historical Analysis. In A. K. M. A. Ullah (Ed.), *Handbook of Migration, International Relations and Security in Asia* (pp. 1–19). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8001-7_14-1

Pertiwi, Y. I. (2021). Upaya Sekuritisasi Pemerintah Bangladesh Terhadap Keberadaan Pengungsi Rohingya. *Nation State: Journal of International Studies*, *4*(1), 93–116. https://doi.org/10.24076/nsjis.v4i1.460

Rayhan, A. (2023). *Sheikh Hasina, prime minister of Bangladesh* (Issue August). Independently published. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11548.05769

Rosenau, J. N. (1980). *The Scientific Study Of Foreign Policy* (First). Nichols Publishing Company.

Smith, M. (2019). *Arakan (Rakhine State) A Land in Conflict on Myanmar's Western Frontier*. Transnasional institute.

Taufiq-e-Faruque. (2020). Bangladesh's Policy on Rohingya Refugees: Securitization or What? *NUST Journal of International Peace & Stability*, 28–47. https://doi.org/10.37540/njips.v3i2.54

UNICEF. (2022). *UNICEF: Education milestone for Rohingya refugee children as Myanmar curriculum pilot reaches first 10,000 children*. https://www.unicef.org/rosa/press-releases/unicef-education-milestone-rohingya-refugee-children-myanmar-curriculum-pilot

UNHCR. (2016). *Mixed Movements In South East Asia*. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR - Mixed Movements in South-East Asia - 2016 -- April 2017_0.pdf

UNHCR. (2004). Handbook for Repatriation and Reintegration Activities. *Development*.

WHO. (2024). *WHO's Transformative initiative enhances healthcare for refugees in Rohingya Camps*. https://www.who.int/bangladesh/news/feature-stories/item/who-transformative-initiative-enhances-healthcare-for-refugees-in-rohingya-camps

Voice of America Indonesia. (2019, 6 Maret). *Ratusan Ribu Pengungsi Rohingya Hadapi Masa Depan Tak Pasti*. https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-ribu-pengungsi-rohingya-hadapi-masa-depan-tak-pasti/4824621.html